

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

A. BULAN JANUARI 2022 INFLASI 0,77%

1. Pada bulan Januari 2022 Kabupaten Kudus mengalami inflasi 0,77% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 107,14.
2. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks beberapa kelompok pengeluaran yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,54%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,30%, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,08%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,76%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,70%, kelompok transportasi sebesar 0,67%, kelompok kesehatan sebesar 0,34%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,33% dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05%
3. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,26%.
4. Nasional pada bulan Januari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,56% sedangkan Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,43%.
5. Inflasi di Jawa Tengah terjadi di semua kota SBH yaitu Kota Kudus sebesar 0,77%, Kota Tegal sebesar 0,70%, Kota Purwokerto sebesar 0,67%, Kota Cilacap sebesar 0,66%, Kota Surakarta sebesar 0,41% dan Kota Semarang sebesar 0,31%.
6. Tingkat inflasi tahun kalender bulan Januari 2022 Kabupaten Kudus sebesar 0,77%, sedangkan tingkat inflasi "*tahun ke tahun*" (Januari 2022 terhadap Januari 2021) sebesar 2,10%.

B. BULAN FEBRUARI 2022 INFLASI 0,06%

1. Pada bulan Februari 2022 Kabupaten Kudus mengalami inflasi 0,06% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,20.
2. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks beberapa kelompok pengeluaran yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,74%, kelompok kesehatan sebesar 0,98%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,63%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,38%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 0,15%, kelompok transportasi sebesar 0,08%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,06%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05% dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03%.
3. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,70%.
4. Nasional pada bulan Februari 2022 mengalami deflasi sebesar 0,02% sedangkan Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,01%.
5. Inflasi di Jawa Tengah terjadi di lima kota SBH yaitu Kota Surakarta sebesar 0,32%, Kota Tegal sebesar 0,19%, Kota Kudus Cilacap sebesar 0,07%, Kota Kudus sebesar 0,06% dan Kota Purwokerto sebesar 0,03%. Sedangkan Kota Semarang mengalami deflasi sebesar 0,08%.
6. Tingkat inflasi tahun kalender bulan Februari 2022 Kabupaten Kudus sebesar 0,83%,

sedangkan laju inflasi “*tahun ke tahun*” (Februari 2022 terhadap Februari 2021) sebesar 1,95%.

C. BULAN MARET 2022 INFLASI 0,81%

1. Pada bulan Maret 2022 Kabupaten Kudus mengalami inflasi 0,81% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,07.
2. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,43%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,41%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27%, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,12%. dan kelompok transportasi sebesar 0,06%.
3. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah
4. Nasional pada bulan Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,66% dan Jawa Tengah juga mengalami inflasi sebesar 0,75%.
5. Inflasi di Jawa Tengah terjadi di enam kota inflasi, yaitu Kota Cilacap sebesar 1,19%, Kota Surakarta sebesar 0,93%, Kota Tegal sebesar 0,89%, Kota Purwokerto sebesar 0,82%, Kota Kudus sebesar 0,81% dan Kota Semarang sebesar 0,66%.
6. Tingkat inflasi tahun kalender bulan Maret 2022 Kabupaten Kudus sebesar 1,65%, sedangkan laju inflasi “*tahun ke tahun*” (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 2,70%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN KUDUS TRIWULAN I TAHUN 2022

Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi di Kabupaten Kudus pada Triwulan I Tahun 2022 adalah :

1. Beras
2. Minyak goreng
3. Bawang merah
4. Telur ayam ras
5. Upah tukang bukan mandor

2 (dua) komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Kabupaten Kudus pada Triwulan I Tahun 2022 berasal dari kelompok *volatile food*. Harga komoditas penyumbang inflasi cenderung tinggi namun masih terkendali. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan bahan makanan menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022. Inflasi pada kelompok *volatile food* di Kabupaten Kudus dipengaruhi kenaikan harga beras dan minyak goreng.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kudus pada Triwulan I Tahun 2022 ini antara lain:

Menginformasikan sumber dan potensi tekanan inflasi melalui siaran pers yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Kudus setiap bulan.

2. Melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan Rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi.
 3. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, serta jasa melalui survei perkembangan harga yang dilakukan setiap harinya oleh Dinas Perdagangan. Melaksanakan survei harga bersama-sama antara Tim Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus dengan Tim BPS Kabupaten Kudus guna sinkronisasi harga yang ada di pasaran.
 4. Melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di pasaran melalui monitoring terhadap distributor barang-barang yang bersifat strategis terhadap kebutuhan masyarakat.
 5. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Tengah.
 6. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Dengan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya, pengelolaan cadangan pangan dan penganekaragaman pangan.
 7. Melakukan pengawasan kondisi kelancaran lalu lintas dan melakukan manajemen lalu lintas dalam rangka memperlancar distribusi barang dan jasa di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi Triwulan I Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan program ketahanan pangan di Kabupaten Kudus.
 2. Pemantauan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan setiap hari.
 3. Monitoring distribusi barang strategis kebutuhan pokok masyarakat.
 4. Analisa sumber atau potensi tekanan inflasi yang dilakukan setiap bulan.
 5. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian.
 6. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten.
 7. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan Poros Desa.
 8. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan Desa.
 9. Rehabilitasi pasar-pasar tradisional.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN KUDUS TRIWULAN I TAHUN 2022

A. Dinas Perdagangan

1. Tetap melakukan monitoring perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang

- penting lainnya dan memasukkan hasilnya dalam aplikasi SIHATI TPID Provinsi Jawa Tengah secara rutin;
2. Melakukan pembinaan terhadap distributor dan pengecer pupuk untuk mempersiapkan penyaluran pupuk pada Masa Tanam II, sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk;
 3. Melaksanakan operasi pasar untuk penjualan minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan di pasar;
 4. Tetap melaksanakan monitoring perkembangan harga bahan pokok, barang penting dan barang umum lainnya di Kabupaten Kudus serta melaporkan hasilnya secara rutin;
 5. Agar mencermati kenaikan harga di pasaran dan mengupayakan untuk menjaga kestabilan harga terutama harga minyak goreng dan gula pasir;
 6. Tetap melakukan pengawasan distribusi agar tidak terjadi penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022;
 7. Tetap melaksanakan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya agar tidak terjadi kenaikan harga barang selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022.

B. Dinas Pertanian dan Pangan

1. Melakukan pendampingan petani dalam proses panen dan penanganan pasca panen Masa Tanam I serta persiapan Masa Tanam II;
2. Memantau dan menjaga kestabilan harga beras untuk ketersediaan stok di pasaran pada musim penghujan ini;
3. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana, pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan;
4. Agar menjaga ketersediaan stok distribusi pangan di Kabupaten Kudus. Selain itu agar tetap mengupayakan inovasi baru di bidang pertanian guna meminimalisir ketergantungan Kabupaten Kudus pada daerah lain penghasil bahan makanan;
5. Tetap menjaga ketersediaan bahan pangan pokok serta meningkatkan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Kudus pada bulan Ramadhan ini dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022.

C. Seluruh Anggota TPID

Seluruh anggota TPID agar turut serta menjaga pengendalian inflasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.